



PERAN SEKOLAH PASAR DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN EKONOMI KERAKYATAN

Ivan Aditya Rozzaq¹

¹Prodi Pendidikan Ekonomi,
Universitas Negeri Malang (penulis 1)
email: revanditzz@gmail.com

Abstrak

Selama ini Paradigma Perekonomian Indonesia selama ini masih belum bisa berdaulat seutuhnya menegakkan ekonomi kerakyatan yang selama ini telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sistem Ekonomi Indonesia ternyata masih condong ke arah neoliberalis. Hal tersebut terlihat dari semakin terperosoknya perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya paham neoliberalisme di Indonesia adalah penelenggaraan pendidikan ekonomi yang masih belum memiliki orientasi pada ekonomi kerakyatan. Faktanya teori-teori ekonomi warisan negara barat masih menjadi ajaran utama di berbagai jenjang sekolah di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, akibatnya generasi muda makin abai dengan permasalahan sosial. Selain itu kesenjangan ekonomi yang terjadi diantara rakyat semakin melebar, kesejahteraan lebih banyak dinikmati oleh segelintir rakyat elit saja sedangkan sebagian besar rakyat masih belum dapat merasakannya. Menyikapi permasalahan tersebut, diperlukan gagasan tentang Sekolah Pasar dalam ranah pendidikan sebagai bentuk usaha menghidupkan kembali paradigma ekonomi kerakyatan.

Kata kunci: ekonomi kerakyatan, pasar tradisional, sekolah pasar

Era globalisasi di Indonesia mengalami masalah perekonomian yang semakin kompleks, khususnya pada sistem perekonomian Indonesia yang masih belum jelas arah tujuannya. Sistem ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sekarang hanya seperti sebuah gagasan saja. Pemerintah saat ini lebih mengutamakan pertumbuhan daripada pemerataan, yang justru menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup lebar antar rakyat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi negara Indonesia mencapai [angka 6,23%](#) dan diklaim sebagai yang tertinggi di Asia pada saat itu. Namun, tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia masih tetap tinggi. Penyebabnya, tidak lain karena neoliberalisme lebih mengutamakan kebebasan dan kepentingan pemodal (kapital) daripada kepentingan rakyat banyak. Pembangunan nasional pun digerakkan melalui kredit dari negara-negara maju yang tak bisa berjalan di luar orbit kapitalisme dunia.

Sejalan dengan itu kapitalisme juga menyebar ke segala aspek ekonomi

sebagai dampak dari globalisasi yang tak terbendung. Sebagian besar masyarakat Indonesia kini telah melupakan semangat kerakyatan yang sebenarnya merupakan dasar sistem perekonomian Indonesia. Manusia yang seharusnya merupakan modal utama dalam usaha, namun kini kenyataannya telah tergeser oleh modal. Masyarakat lebih sering mengeluhkan usahanya bermasalah dengan modal finansial. Akibatnya masyarakat yang memiliki modal kecil sangat tergantung pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Dalam hal ini masyarakat yang pun telah menjadi “pasar” bagi perusahaan keuangan. Walaupun modal sesungguhnya diperlukan tapi pemujaannya yang berlebihan justru telah mengabaikan modal manusia dan modal sosial yang semestinya diutamakan. Urusan manusia dianggap sebagai urusan sosial dan kembali ke pribadi masing-masing.

Hasil Studi Media Data (2009) menunjukkan bahwa pada tingkat nasional, saat ini 28 ritel modern utama menguasai 31% pangsa pasar ritel dengan total omset sekitar Rp. 70,5 triliun. Ini artinya bahwa satu perusahaan rata-rata menikmati Rp. 2,5

Trilyun omset ritel/tahun atau Rp. 208,3 milyar/bulan. Hal ini kontras dengan ritel tradisional yang memiliki total omset sebesar Rp. 156,9 trilyun namun dibagi kepada sebanyak 17,1 juta pedagang, yang 70%-nya masuk kategori informal. Dengan demikian satu usaha pedagang tradisional rata-rata hanya menikmati omset sebesar Rp. 9,1 juta /tahun atau Rp. 764,6 ribu/bulan. Kondisi tersebut seirama dengan hasil penelitian AC Nielson (2006) yang menyatakan bahwa pasar modern tumbuh sebesar 31,4% sedangkan pasar tradisional tumbuh negatif 8%. Hal tersebut menggambarkan bahwa modal masih mendominasi atau menjadi faktor utama dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Tanpa adanya modal yang kuat masyarakat tak mampu untuk berbuat banyak dalam era globalisasi ini. Segala kegiatan ekonomi di Indonesia masih bertumpu pada kekuatan modal tanpa memperhatikan variabel lain.

Padahal bila kita merujuk pada teori ekonomi kerakyatan, modal bukanlah satu-satunya variabel yang dapat menggerakkan sebuah usaha. Ada variabel lain yang harus dimasukkan sebagai determinan

penting pada kinerja usaha, variabel tersebut adalah sumber daya manusia, kolektivisme dan peran negara. Sementara bila melihat kenyataannya di Indonesia, kita masih lebih condong menganut neoliberalisme. Lebih memprihatinkannya teori-teori ekonomi ini pun masih menjadi ajaran utama di berbagai jenjang sekolah di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Akibatnya generasi muda makin abai dengan pasar tradisional dan lebih suka berbelanja di pusat perbelanjaan modern.

Sehingga dalam menyikapi permasalahan yang telah diungkapkan di atas, penulis ingin menghidupkan kembali paradigma ekonomi kerakyatan yang selama ini telah tergeser oleh paradigma ekonomi neoliberalisme. Salah satu caranya yaitu dengan mengenalkan gagasan dalam ranah pendidikan non-formal.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka, baik yang diambil secara kepustakaan konseptual maupun kepustakaan penelitian. Secara konseptual kajian ini didapat dari beberapa penelitian dari BPS, Pusat

Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada dan penelitian yang terdapat dalam Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen. Setelah data-data tersebut terkumpul, penulis melakukan tiga aktivitas berdasarkan model miles dan husman (dalam Sahid, R. 2011) diantaranya data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengkaji permasalahan ini perlu dipahami terlebih dahulu makna, tujuan, konsep dan implementasi sistem ekonomi kerakyatan. Kemudian setelah memahami hal tersebut penulis ingin mengenalkan sebuah alternatif yang dapat menghidupkan kembali paradigma ekonomi kerakyatan melalui jalur pendidikan non-formal.

Sistem Ekonomi Kerakyatan

Di dalam buku Politik Ekonomi Kerakyatan, yang ditulis oleh Sarbini Sumawinata (2004:161), menyatakan ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim diperdesaan.

Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel berjudul

Ekonomi Rakyat dalam Bahaya, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut: “*Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan (Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930: 31)*” Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia.

Jadi sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang berupaya memindahkan kedaulatan ekonomi dari oligarki para pemilik modal ke tangan seluruh rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya

mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan lain sebagainya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Pengertian demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang memuat tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bangun perusahaan yang sesuai dengan tiga prinsip tersebut ialah koperasi. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan sangatlah

besar. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34.

Tujuan Terbentuknya Ekonomi

Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan bukanlah suatu ideologi atau gagasan baru tentang perekonomian, tetapi merupakan perumusan interpretasi serta cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Para pendiri republik telah mempelopori kita dengan perumusan dasar yang jelas. Akan tetapi, perumusan dasar ini memerlukan interpretasi dan penerjemahan dalam suatu strategi dan program pembangunan yang lebih berfungsi dan lebih menjamin arah pada cita-cita nya tersebut. Kita mulai dengan menyatakan bahwa dalam cita-cita masyarakat adil dan makmur terkandung suatu pernyataan bahwa keadaan kita dimulai dengan keadaan yang tidak merata dan tidak adil. Rakyat banyak masih tetap terbelakang dan miskin.

Disamping lapisan atas yang beruntung dapat memiliki dan menguasai bidang materil yang cukup mendalam. Karena itu dalam menerjemahkan rumusan dasar tersebut kita dapat menghindari tugas untuk memperhatikan dan

menekankan perhatian kita pada perbaikan nasib rakyat banyak yang kurang baik. Hal ini berarti, baik strategi maupun program pembangunan harus memusatkan dana dan daya pada perbaikan nasib rakyat, secara materil maupun spiritual.

Lebih 50 % rakyat Indonesia hidup diperdesaan diantaranya masuk kategori rakyat desa serba kekurangan atau miskin, awal 2012 terdapat 15,72 %. Dengan demikian, logika menunjukkan bahwa setiap strategi pembangunan yang mengarah pada cita-cita, haruslah memperhatikan daerah pedesaan. Dalam struktur ekonomi, bahkan struktur masyarakat warisan kolonial, pedesaan adalah salah satu belahan dari dua belahan dalam struktur itu yang mengalami nasib terburuk. daerah Pedesaan inilah yang relatif sangat terbelakang. Mengutamakan pembangunan di Desa tidak berarti seluruh dana dan daya dipusatkan dan diarahkan kepada pembangunan Desa, dengan menelantarkan daerah kota. Pembangunan besar besaran pedesaan justru memerlukan dukungan dan bantuan pembangunan yang lebih pesat dan lebih maju,

khususnya dalam rangka industrialisasi yang pada dasarnya harus berorientasi pada dukungan akan penyediaan kebutuhan bagi pembangunan besar-besaran dipendesaan. Di dalam rangka pembangunan besar-besaran ini, pilihan teknologi merupakan pilihan yang strategis. Arti bidang teknologi ini jangan dikecilkan. Hal ini karena teknologi terpenting dalam penciptaan struktur dan keadaan ekonomi masyarakat kolonial yang kita alami hingga kini adalah kehadiran kapitalisme modern dengan teknologi yang jauh lebih tinggi dan tidak mungkin terjangkau masyarakat kita.

Membangun tidak hanya berarti meningkatkan kemampuan. Membangun juga berarti membangun kesadaran dan kehendak untuk bebas dari keterbelakangan. Kemiskinan dan berbagai macam tekanan yang menghambat kemajuan. Masyarakat Indonesia dewasa ini adalah masyarakat yang kita bentuk dengan membebaskan diri dan merembut kemerdekaan dari penjajahan. Kapitalisme dalam sejarahnya di Indonesia telah menciptakan masyarakat yang terbelah dalam dua dunia yang berlainan, akan tetapi

hidup berdampingan dalam satu negara dan bangsa. Oleh karena itu, dalam strategi maupun program pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan mengandung tiga unsur, yaitu demokrasi, keadilan sosial dan bersifat populistik.

Implementasi Sistem Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia

Dalam mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Demokrasi ekonomi adalah kebebasan ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, hingga sekarang, refleksi dari demokrasi ekonomi belum dapat dicapai secara penuh. Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan, menjadikan pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaruan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu ciri demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memihak kepada rakyat dan tidak sebatas hanya berkuat pada makna ekonomi kerakyatan saja. Karena bisa jadi

makna rakyat dalam hal ini hanya segelintir “rakyat-elit” yang tidak menjangkau rakyat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata. Dengan demokrasi ekonomi diharapkan akan terwujud kesatuan kekuatan ekonomi nasional (terdiri atas koperasi, usaha negara, dan usaha swasta) yang berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan, sebagai unsur mutualisme yang mengacu pada interdependensi antar individu dalam hidup bermasyarakat.

Namun pada kenyataannya sistem ekonomi kerakyatan yang telah dicita-citakan sebelum Indonesia merdeka ini belum pernah berdaulat secara utuh hingga sekarang. Pertama sistem perekonomian Indonesia masih condong pada corak kolonial karena sebagian besar struktur terbangunnya perekonomian di Indonesia merupakan warisan atau tinggalan kolonial. Kedua liberalisasi yang terjadi di Indonesia bukan merupakan sebuah hal baru, karena praktek

tersebut sudah terjadi sejak era kolonial. Kedua hal tersebut diperkuat juga dengan penelitian Revrisond Baswir (2009) yang menyatakan transformasi ekonomi yang dialami Indonesia dalam 64 tahun terakhir sesungguhnya tidak lebih dari transisi belaka dari ekonomi kolonialisme menuju ekonomi neokolonialisme. Proses transisi itulah antara lain yang menjelaskan semakin terperosok perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal dalam beberapa waktu belakangan ini.

Intervensi liberalisme telah merasuk pada berbagai aspek penting dalam pembangunan struktur perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Secara sadar maupun tidak sadar pendidikan ekonomi di Indonesia telah jauh melenceng dari dasar perekonomiannya sendiri. Berbagai hal penting yang seharusnya diberikan lewat pendidikan untuk menguatkan sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan jati diri bangsa kita telah banyak dilupakan. Ilmu ekonomi justru sangat sedikit menyentuh realitas kehidupan para pelaku ekonomi menengah ke bawah.

Hal ini dibenarkan oleh guru besar Universitas Indonesia Prof. Sri Edi Swasono, yang mana beliau mengistilahkan fenomena ini dengan sebutan *academic hegemony* dan *academic poverty*. Beliau mengutarakan lebih lanjut bahwasannya *academic hegemony* ini merupakan penjajahan akademis melalui silabus-silabus atau teori-teori barat yang diterapkan dalam perkuliahan ilmu ekonomi. Sedangkan *poverty hegemonic* adalah dampak dari *academic hegemony* yang mana para pengajar atau dosen hanya mengikuti arus perkuliahan dan mengagung-agungkan teori barat saja tanpa pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas sosial. Padahal sejatinya teori-teori barat yang individualistik tidak relevan dengan realitas atau karakter bangsa Indonesia yang kolektif.

Menurut Chatib Basri “kantongi dulu nasionalismemu, tidak ada tempat bagi nasionalisme di tengah benderangnya arus globalisasi”. Neoliberalisme yang masuk dengan membongkang globalisasi saja sudah diagungkan oleh para elit kita. Yang terjadi tentu saja, pemerintah saat ini lebih mengutamakan pertumbuhan

daripada pemerataan, yang justru menimbulkan kesenjangan sosial. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi negara Indonesia mencapai [angka 6,23%](#) dan diklaim sebagai yang tertinggi di Asia pada saat itu. Namun, tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia masih tetap tinggi. Penyebabnya, tidak lain karena neoliberalisme lebih mengutamakan kepentingan pemodal (kapital) daripada kepentingan rakyat, dimana dapat dikatakan, ini merupakan akar dari kapitalisme berkelanjutan.

Fenomena yang paling mencolok dari efek neoliberalisme adalah eksistensi retail-retail modern kini telah menggusur pasar tradisional yang menghidupi rakyat banyak. Sangat disayangkan di ranah masyarakat kita berkembang suatu paradigma “pasar modern” dan “pasar tradisional” yang seakan menciptakan gap. Padahal, esensi dari kedua hal tersebut sama, yakni pelaku ekonomi. Yang menjadi perbedaan disini adalah nilai ideologinya. Pasar modern merupakan suatu produk baru yang diusung oleh liberalisasi ekonomi, sedangkan pasar tradisional

merupakan suatu produk lama yang mengusung nilai-nilai ekonomi kerakyatan, yakni mengandung ideologi lama yang diusung oleh para pendahulu.

Seharusnya apabila ditinjau melalui undang-undang, adanya pasar modern ini tidak salah, namun harus menjamin hidup orang banyak, artinya tidak dikuasai oleh satu orang saja, melainkan dikuasai oleh rakyat. Sehingga akumulasi profit tidak masuk ke kantong orang per orang, namun masuk merata ke rakyat. Bukan tidak mungkin “pasar modern” akan menggantikan “pasar tradisional”. Asalkan tetap berpegang teguh pada pasal 33 UUD 1945 yakni dikuasai dan dinikmati oleh rakyat banyak.

Peran negara yang seharusnya menomorsatukan kepentingan rakyat sudah digulingkan oleh neoliberalisme. Neoliberalisme memacu pertumbuhan ekonomi, namun justru rakyatlah yang menjadi korban. Neoliberalisme membuat kesenjangan sosial di Indonesia semakin kentara. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang ada pada undang-undang, terutama pasal 33 UUD 1945 yang

berkaitan dengan demokrasi ekonomi, dimana sistem ekonomi Indonesia berpegang teguh pada prinsip nasionalisme dan mengutamakan kepentingan rakyat demi terciptanya kesejahteraan rakyatnya. Ini jelas bertentangan dengan neoliberalisme, dimana pemodal menjadi dominan dalam pembangunan, yang mana rakyatpun menjadi korban.

Pendidikan Ekonomi Kerak-yatan Melalui Sekolah Pasar

Sekolah Pasar merupakan sebuah program pendidikan non-formal yang akan dikenalkan sebagai alternatif dalam menghidupkan kembali paradigma ekonomi kerakyatan melalui jalur pendidikan.

- **Sekolah Pasar**

Sekolah Pasar adalah gerakan mengajar di pasar tradisional yang dilakukan oleh puluhan relawan dari berbagai latar belakang di Kota Yogyakarta dengan pilot project di Pasar Kranggan. Sekolah Pasar merupakan upaya untuk memberikan sumbangsih bagi perwujudan amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 31 dan Pasal 33.

Sekolah Pasar dicitakan sebagai media pengembangan bagi

pelaku pasar tradisional. Karena sebagian besar para pelaku ekonomi Indonesia terdiri dari para pelaku pasar tradisional yang mulai terpinggirkan oleh kehadiran retail modern yang memiliki modal kuat. Dominasi kuat dari segelintir elit masyarakat akan terus menciptakan gap yang semakin melebar antara para pelaku pasar modern dan pelaku pasar tradisional. Oleh karena itulah dibuat sebuah pendidikan nonformal yang bernama sekolah pasar sebagai wahana belajar bersama, bertukar pikiran, serta tempat persemaian gagasan inovasi dan kemajuan pasar tradisional agar mampu bersaing dalam era globalisasi ini. Sekolah pasar diperuntukkan baik bagi pedagang, pemasok, pengecer, konsumen, dan siapapun yang menaruh kepedulian pada ekonomi kerakyatan. Sekolah Pasar juga akan menjadi media rintisan pembersatuan ekonomi para pelaku pasar tradisional, yang kini masih cerai-berai. Dengan diadakannya sekolah pasar diharapkan dapat menjadi perekat dan perapat barisan pegiat industri desa, koperasi sejati, dan pasar tradisional. Hanya

dengan kebersatuan inilah maka mereka sanggup menghadapi setiap tantangan dan perubahan dalam era globalisasi.

Sekolah Pasar bertumpu pada pembangunan manusia pedagang. Oleh karenanya ia berusaha memenuhi kebutuhan substantif manusia, yaitu pengembangan nilai-nilai, pola pikir, dan ilmu pengetahuan baru. Substansi kurikulum juga disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan masalah spesifik yang dihadapi pelaku pasar tradisional.

Dalam perkembangannya inovasi dan kontekstualisasi kurikulum akan selalu dilakukan. Oleh karenanya kurikulum tersebut dibahas terlebih dahulu dengan para pengurus Paguyuban dan Koperasi Pasar.

• **Jenjang Dan Jangka Waktu**

Dalam Sekolah Pasar

Sekolah Pasar merupakan integrasi dua tingkatan pendidikan dan pelatihan, yaitu tingkat dasar (basic) dan menengah (intermediate). Bagi yang sudah menempuh dua tingkatan tersebut maka dapat dikirimkan ke berbagai diklat di luar pasar untuk tingkatan ahli (advance). Pengiriman dapat

dilakukan ke kelas-kelas di Perguruan Tinggi, diklat pemerintah, dan berbagai seminar, konferensi, workshop, dan in-house training lainnya.

Sekolah Pasar dilangsungkan selama 6 bulan pada setiap tingkatan. Dengan demikian, setiap tahun Sekolah Pasar dapat menyelenggarakan dua angkatan. Dalam rangka penyegaran dan pembaruan maka bagi mereka yang sudah menempuh pendidikan tingkat dasar dan menengah akan diadakan pengajian / seminar reguler, pelatihan tematik, atau workshop per 2 bulan setiap tahunnya.

Peserta dinyatakan lulus Sekolah Pasar sesuai dengan tingkatan yang diikutinya dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari pengelola. Semua pengurus koperasi pasar dan organisasi lain yang terkait pasar tradisional memiliki semestinya sertifikat kelulusan Sekolah Pasar tersebut. Selanjutnya Sekolah Pasar akan menyelenggarakan program-program pendidikan sepanjang hayat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan.

• **Metode Pembelajaran Dan**

Tenaga Pengajar

Pembelajaran yang dikembangkan dalam Sekolah Pasar adalah metode pembelajaran konstruktif bagi orang dewasa, yang dikemas secara populer, menarik, dan atraktif. Pembelajaran dilakukan dengan kombinasi model klasikal, diskusi interaktif, observasi lapangan, simulasi, tutorial dan berbagai variasi model lainnya yang diusahakan agar peserta tidak mengalami kebosanan. Pembelajaran berangkat dari modalitas sosial yang sudah dimiliki oleh para pelaku pasar tradisional.

Pembelajaran menggunakan pendekatan hadap-masalah dan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan. Metode ini diarahkan untuk membangun dan memperbarui bukan saja kapasitas pengetahuan, tetapi juga jiwa dan hati para pegiat pasar tradisional. Sekali lagi hal ini karena Sekolah Pasar merupakan alat untuk membangun kesadaran, karakter, dan mindset manusia, dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia tentu bukan sekedar meningkatkan kapasitas otak pesertanya.

Tenaga pengajar Sekolah Pasar adalah siapapun yang bersedia membagi ilmunya bagi kemajuan pasar tradisional. Mereka dapat berasal dari akademisi (dosen, mahasiswa, dan peneliti), aktivis LSM, teknokrat, pegiat koperasi pasar, termasuk dari berbagai unsur di dalam pasar tradisional itu sendiri. Rekrutmen pengajar dilakukan melalui mobilisasi terbuka di berbagai media sosial (online). Sebagai perintis awal adalah tenaga pengajar dari DesaMart, Pusat Studi Kewirausahaan UMB Jogja, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, dan Mubyarto Institute. Sebagai bagian dari elemen Sekolah Pasar maka pada saat yang bersamaan dikembangkan Klinik Pasar, sebagai media konsultasi lanjutan bagi para pelaku usaha pasar tradisional. Tenaga pengajar dalam klinik tersebut sesuai bidang keahliannya dan dengan jadwal yang ditetapkan.

• Program Utama Sekolah Pasar

1) Kelas Pasar

Kelas Pasar adalah program pertemuan rutin dwi mingguan yang bersifat klasikal dan

diskusi. Di dalam kelas pasar inilah pedagang dan koperasi melakukan diskusi bersama Sekolah Pasar selama 8 – 12 kali pertemuan. Materi dalam kelas pasar diperoleh dari assessment yang terbagi menjadi dua yakni materi umum dan materi khusus. Materi umum adalah materi yang selalu ada dalam seluruh Sekolah Pasar. Materi khusus adalah materi yang disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing pasar.

Materi Pokok Bahasan

- Pasar Rakyat dan Perekonomian Indonesia, membahas peran dan posisi pasar rakyat dalam perekonomian Indonesia.
- Kewirausahaan, Membahas cara membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan.
- Koperasi Pasar dan Pasar Rakyat, Membahas peran strategis koperasi pasar dalam mengembangkan pasar rakyat.

- Kebijakan Pemerintah, Membahas Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan pasar rakyat.

2) Klinik Pasar

Klinik Pasar adalah program pendampingan untuk pedagang dan koperasi. Sekolah Pasar melakukan pendampingan langsung pada pedagang dan koperasi untuk bersama-sama memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pedagang dan koperasi. Materi dalam klinik pasar diperoleh dari assessment dan hasil diskusi dalam kelas pasar.

3) Pendidikan Konsumen

Pendidikan Konsumen adalah program kampanye kepada masyarakat luas agar tidak meninggalkan pasar rakyat, pasarnya sendiri. Program pendidikan konsumen dilakukan melalui website, buletin, dan media sosial seperti facebook dan twitter.

Melihat kondisi pasar tradisional yang kini semakin terpinggirkan oleh pasar modern, Sekolah Pasar mungkin dapat menjadi sebuah alternatif pendidikan agar realisasi visi misi pasar tradisional kedepan dapat tercapai. Secara khusus sekolah pasar dapat pula dijadikan instrumen inovasi Pendidikan Dasar dan Menengah para anggota dan pengurus koperasi pasar. Hal ini juga merupakan bagian dari usaha revitalisasi koperasi pasar. Sekolah Pasar juga akan menjadi media pendidikan untuk menanamkan kecintaan kepada anak-anak, remaja, dan mahasiswa terhadap produk-produk lokal dan pasar tradisional. Sekolah Pasar akan menjadi media pengkaderan, pewarisan, dan persemaian nilai-nilai kebersamaan dan kemandirian ekonomi yang perlu dimiliki generasi muda calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan ketidak sesuaian antara paradigma sistem ekonomi kerakyatan dan keadaan yang sudah dipaparkan sebelumnya, terdapat sebuah alternatif yang dapat ditawarkan dalam menyelesaikan

problematika tersebut, salah satunya adalah melalui jalur pendidikan. Sekolah Pasar adalah sebuah program yang digagas oleh Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada untuk merealisasikan kedaulatan ekonomi kerakyatan melalui pendidikan nonformal. Sekolah Pasar memiliki sasaran utama yaitu para pelaku ekonomi pasar tradisional, dimana masih banyaknya para pelaku ekonomi pasar tradisional yang hidup kurang sejahtera. Hal tersebut sangat berlawanan dengan para pelaku ekonomi pasar modern yang sangat sejahtera. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut Sekolah Pasar menyelenggarakan program-program pendidikan sesuai dengan kebutuhan para pelaku ekonomi dan perkembangan lingkungan hingga sepanjang hayat. Dari program-program yang sudah disusun oleh Sekolah Pasar diharapkan revitalisasi koperasi dapat berjalan dan mencetak output yang memiliki nilai-nilai kebersamaan, kemandirian dan kecintaan terhadap produk-produk lokal dan pasar tradisional. Sehingga nantinya kesejahteraan akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya beberapa rakyat elit saja. Selain

itu juga diperlukan peran dari berbagai elemen penting dalam menghidupkan kembali paradigma ekonomi kerakyatan. (1) Para akademisi seharusnya mampu memberikan sumbangan pemikiran dan tenaganya bagi kemajuan pasar tradisional; (2) Kemudian pemerintah seharusnya turut aktif dalam penyelenggaraan Sekolah Pasar; (3) Dan yang terakhir masyarakat luas seharusnya ikut serta dalam mensosialisasikan Sekolah Pasar.

Universitas Gadjah Mada. 2014. *Sekolah Pasar*. (Online). (sumber: <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program/sekolah-pasar/>)

Sahid, R. 2011. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman*, (online). (<http://sangat26.blogspot.co.id/2011/7/analisis-data-penelitian-kualitatif.html>)

Sekolah Pasar. 2014. *Neoliberalisme dan Pasar Tradisional* (sumber: <http://www.sekolahpasar.org/neoliberalisme-dan-pasar-tradisional/>)

Soekarno. 1930. *Indonesia Menggugat*. SK Seno: Jakarta

Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

DAFTAR RUJUKAN

- AC Nielsen. 2006. *Survey of Consumer Behaviour and Perceptions Toward Modern and Traditional Trade Channels*. Jakarta : Departemen Perdagangan Republik Indonesia
- Anonimous, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33.
- Baswir, Revrison. 2009. *Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme*. Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. 2012. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012*. (Online). (sumber: <https://www.bps.go.id/>)
- Idris, Amiruddin. 2013. *Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*. Jurnal ekonomika Universitas Almuslim Bireuen. Vol.IV No.8 September 2013
- Mubyarto, dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Lembaga Suluh Nusantara
Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan